

Orang Jabar Minoritas di PTN Daerah Sendiri

Tersingkir di Jawa Barat

MENINGKATNYA jumlah orang yang berminat masuk ke perguruan tinggi negeri sudah barang tentu menggembirakan. Kegembiraan itu pula yang disampaikan Rektor Universitas Padjadjaran Ganjar Kurnia dalam sambutan Dies Natalis ke-55 Unpad, Selasa (11/9).

Sejak beberapa tahun terakhir, jumlah pendaftar melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) ke Unpad terus bertambah. Pada tahun 2009/2010 jumlah pendaftarnya mencapai 38.766 orang dan berangsur-angsur meningkat menjadi 56.256 orang pada tahun

2011/2012 serta 64.710 orang pada tahun 2012/2013. Begitu pula dengan Seleksi Masuk Universitas Padjadjaran (SMUP) S1 yang jumlahnya meningkat dari sekitar 19.000 orang pada 2011 menjadi 24.000 orang pada 2012.

Menarik, bahwa dengan seleksi nasional, pada akhirnya bangku-bangku kuliah di Unpad lebih banyak diduduki mahasiswa dari luar Jabar. Pada tahun 2012 ini hanya 49,7 persen mahasiswa asal Jabar di Un-

Berita Terkait
Elite Sunda tak Punya Ambisi
Wawancara
Rektor Unpad
Ganjar Kurnia

Hal. 21

pad. Padahal tahun sebelumnya persentasenya sedikit lebih tinggi, sekitar 52 persen. Dari persentase itu, sekitar 51 persen mahasiswa Jabar berasal dari sekolah-sekolah di Bandung dan sisanya dari sekolah di kota/kabupaten di Jawa Barat.

Ganjar melihat fenomena itu sebagai hal yang mengkhawatirkan. Soalnya, tujuan didirikannya Unpad di antaranya untuk mengembangkan sumber daya manusia Jabar.

Solusinya jelas bukan dengan memberi kemudahan kepada warga Jabar dengan tujuan meningkatkan jumlahnya di Unpad. Ganjar pun menolak adanya usulan untuk memberlakukan kebijakan yang bersifat afirmatif karena hal tersebut malah akan membuat calon mahasiswa Jabar menjadi manja dan malas bersaing. Menurutnya, peningkatan kualitas daya saing dalam persaingan nasional merupakan cara terbaik untuk meningkatkan mutu dari SDM Jabar.

Unpad bukan satu-satunya PTN di

Jabar yang jumlah mahasiswa asal Jabarnya menurun. Institut Teknologi Bandung sebagai salah satu PTN bergengsi tidak hanya di Jabar, tetapi juga nasional, jumlah mahasiswa asal Jabarnya setiap tahunnya minoritas.

Berdasarkan data dari ITB, pada tahun 2010 mahasiswa asal Jabar sekitar 1.133 orang (36,6 persen) menjadi 1.309 orang (39,7 persen) pada 2011 dan 1.267 orang (36,8 persen) pada 2012. Sementara mahasiswa dari luar Jabar 1.966 orang (63,4 persen) pada 2010 menjadi 1.991 orang (60,3 persen) pada 2011 dan 2.174 orang (63,25) pada tahun 2012.

Menurut Wakil Rektor ITB Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Kadarsah Suryadi, lebih dominannya mahasiswa ITB dari luar Jabar terjadi karena semakin luasnya akses orang luar Jawa untuk mendapatkan informasi tentang ITB. Ditambah lagi adanya jalur undangan terhadap para siswa SMA di luar Jawa yang berprestasi untuk diterima di PTN, termasuk di ITB. "Siapa pun yang berprestasi, punya peluang yang sama," katanya menegaskan.

Masih dominan

Sementara di Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, mahasiswa asal Jabar

masih mendominasi. Terlihat dari persentase mahasiswa asal Jawa Barat yang berada di kisaran 86 persen, baik itu pada tahun 2010, 2011 maupun 2012. Sementara mahasiswa asal luar Jawa Barat persentasenya sekitar 14 persen.

Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan UPI Dadang Sunendar menuturkan, menurunnya jumlah mahasiswa asal Jabar di PTN Jabar sebaiknya tidak dianggap sebagai hal yang negatif atau merugikan. Sebaliknya, perlu juga dilihat, berapa banyak putra-putri asal Jabar yang membanjiri PTN terbaik lainnya di Indonesia seperti di Universitas Gadjah Mada.

"Kalau saya melihatnya justru positif karena kompetisi semakin merata. Jangan dulu berprasangka buruk bahwa anak Jabar terkalahkan, belum tentu begitu. Cek dulu secara nasional. Banyak anak-anak Jabar yang diterima di PTN terbaik luar Jawa Barat," tuturnya.

Sosiolog UPI Elly Malihah mengemukakan, sistem penerimaan mahasiswa yang melalui jalur nasional menjadi salah satu faktor penyebab turunnya jumlah mahasiswa asal Jabar di PTN Jabar. Jalur seleksi yang sifatnya terbuka dan dapat diikuti oleh seluruh orang di Indonesia membuat

persaingan masuk PTN pun terbuka lebar dan tidak terbatas oleh daerah-daerah.

Sistem penerimaan semacam itu, kata dia, harus tetap dilaksanakan secara terbuka sehingga persaingan akan lebih transparan. Jangan sampai nanti ada pikiran Indonesia itu Jabar. "Jangan dikotak-kotakkan berdasarkan daerah karena perguruan tinggi itu harus bersifat global, artinya lebih nasional," ujarnya.

Faktor lainnya adalah sistem ujian mandiri masuk PTN di Jabar yang diselenggarakan oleh PTN dengan kuota sekitar 30 persen seharusnya memang banyak diikuti oleh mahasiswa Jabar. Namun, sistem ujian mandiri yang "ditempelkan" ke SNMPTN juga menjadi salah satu faktor akhirnya banyak kursi ujian mandiri yang tidak terisi oleh mahasiswa asal Jabar.

"Mestinya ujian mandiri ini banyak yang ikut dari Jabar tapi karena pendaftarannya disatukan dengan SNMPTN, siapa yang tidak lulus SNMPTN bisa masuk ke PTN dengan jalur mandiri. Jadi, sistemnya pun terbuka secara nasional," katanya.

Elly yang juga Pembantu Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial UPI itu melihat adanya kemungkinan mahasiswa Jabar justru menempuh pendidikan tinggi di luar Jabar.

Hal ini dilihat dengan mulai terbukanya pola pikir dari masyarakat Jabar untuk mau menempuh pendidikan di luar daerahnya terlebih dengan kemudahan teknologi dan kecepatan alat transportasi.

"Kalau dulu kan orang Jabar terkenal tidak suka merantau. Mungkin sekarang dengan pola pikir yang semakin terbuka tidak menutup kemungkinan mereka bersekolah di luar Jabar," katanya.

Menurut Elly, langkah awal untuk menyikapi masih kurangnya mahasiswa asal Jabar di PTN Jabar dengan memperbaiki mutu pendidikan sejak tingkat sekolah. Karena di jenjang pendidikan sekolah dasar, menengah, dan atas itulah calon mahasiswa ini mendapatkan bekal untuk bersaing masuk ke PTN.

Selain itu, terkait dengan rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) Jabar di perguruan tinggi, tidak dapat dimungkiri bahwa banyak lulusan SMA/SMK yang lebih memilih bekerja ketimbang meneruskan kuliah yang biayanya mahal. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memberi bantuan lebih karena jumlah beasiswa yang ada belum mencukupi.

"Tanggung jawab untuk masuk PT tidak hanya tanggung jawab PT, tetapi juga masyarakat dan pemerintah," kata Elly. **(Nuryani, Widi Kusuma Anggraeni/"PR")*****